JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.4, No.3, Agustus 2024

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI PELAYANAN PAJAK (YANJAK) ONLINE DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Oleh
Adiel Islamyathi Nathanya Krystan Tambingon[1], Lisda Van Gobel[2], Jusrin Kadir[3]
[1,2,3] Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.34, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
Email : [1]adieltambingon.ink@gmail.com, [2]lisdavangobel69@gmail.com, [3]kadirjus04@gmail.com

Article History:
Received: 21-07-2024
Revised: 27-07-2024
Accepted: 24-08-2024

Keywords:
Pajak, PBB, Yanjak, Efektivitas

Abstract: *Pajak di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan dan berfungsi untuk mendanai kegiatan. Dengan kemajuan teknologi, pembayaran pajak online menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dari mana saja dan kapan saja selama ada akses internet. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, pelatihan pegawai yang tidak optimal, dan penerapan sistem Yanjak yang belum berjalan maksimal. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Yanjak, menunjukkan bahwa meskipun teknologi mempermudah pembayaran, hambatan-hambatan tersebut mengurangi efektivitas. Mengatasi ini, diperlukan sosialisasi yang lebih baik, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan sistem yang lebih canggih. Rekomendasi strategis diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem pajak online.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam pembayaran pajak. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak.[1] Pembayaran pajak secara online memiliki banyak keuntungan, seperti menjadi lebih mudah diakses, menghemat waktu, dan mengurangi biaya administrasi. Selama tersedia koneksi internet, layanan ini

[1] Yana Indawati, Teddy Prima Anggriawan, and Pusaka Bintang Sakti, "Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9796–9802.

memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan lebih cepat dan dari mana saja. Diharapkan ini akan meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Adapun peraturan mengatur "Pajak Daerah", menurut Peraturan Wali Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2020, yang mengatur pengembangan unit pelayanan pembayaran pajak daerah.[2] Badan Keuangan telah memperbarui sistem pajak daerah, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan akuntansi, serta pengelolaan barang milik daerah (BMD). Ini dilakukan untuk mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Gorontalo.

Proses pengelolaan keuangan daerah terus diperbarui dan didigitalisasi. Ini ditunjukkan dengan pengembangan berbagai aplikasi yang membantu masyarakat dan perangkat daerah mengelola pelayanan pajak dan manajemen keuangan daerah, seperti sistem aplikasi pelayanan pajak (Yanjak), Si Pendi (Sistem Informasi Perbendaharaan Terintegrasi), E-SBU untuk penyusunan Standar Biaya Umum (SBU), e-Impian (Elektronik Informasi Manajemen Persediaan), Sipatanah (Sistem Informasi Manajemen Tanah Milik Daerah), Simaskot (Sistem Informasi Manajemen Aset Kota) sistem aplikasi yang dibuat secara internal.[3] Dengan tujuan membuat masyarakat lebih mudah membayar pajak melalui layanan pembayaran pajak online yang dikenal sebagai Yanjak. Meskipun produk kebijakan ini sudah dijalankan, akan tetapi masyarakat wajib pajak belum memenuhi kepatuhan untuk membayar pajak.

Hal tersebut menjadi permasalahan untuk meningkatkan keoptimalan masyarakat dalam pembayaran melalui pelayanan pajak Yanjak online. Menurut data yang diakses melalui aplikasi https://yanjak.gorontalokota.go.id/realisasi-pajak-daerah/realisasi-penerimaan-pajak . Implementasi produk kebijakan Badan Keuangan Kota Gorontalo belum optimal dalam aturannya, banyak masyarakat belum benar-benar memahami dan memanfaatkan layanan pajak online yang disediakan. Beberapa hambatan untuk optimalisasi layanan ini termasuk kurangnya sosialisasi, kekurangan pelatihan teknis bagi karyawan, dan kendala dalam penerapan sistem. Meskipun ada keunggulan yang dapat dicapai, masih ada tantangan untuk mencapainya, terutama di Kota Gorontalo.

Banyak masyarakat belum benar-benar memahami dan memanfaatkan layanan pajak online yang disediakan oleh aplikasi Yanjak. Beberapa hambatan untuk optimalisasi layanan ini termasuk kurangnya sosialisasi, kekurangan pelatihan teknis bagi karyawan, dan kendala dalam penerapan sistem. Kota Gorontalo memiliki kasus yang terus meningkatnya ketidakpatuhan masyarakat wajib pajak terhadap pembayaran PBB melalui pelayanan pajak Yanjak online. Sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pendapatan daerah untuk kesehjateraan masyarakat Kota Gorontalo.

[2] Juan Pérez Dávila, "Perda Gorontalo" 21, no. 1 (2020): 1–9.
[3] WAHYUDI GOBEL et al., "Implementation of E-Government in Public Services Through the Online Tax System (E-Tax) in the City of Gorontalo," *Russian Law Journal* 11, no. 2s (2023): 305–312.

Tabel 1. Data Potensi Pajak Bumi Bangunan Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Potensi	Jumlah Realisasi
2019	8.537.238.350	7.998.688.854
2020	9.462.223.695	8.732.397.365
2021	13.712.474.749	9.008.955.471
2022	12.401.262.032	10.350.413.314
2023	12.405.989.489	9.629.525.504

Sumber: Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo

Tabel 1. menunjukkan bahwa data pembayaran PBB Kota Gorontalo dalam setiap tahunnya mengalami ketidaksesuaian jumlah potensi dan jumlah realisasinya kurun waktu lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan terhadap pembayaran PBB melalui pelayanan pajak Yanjak online di Kota Gorontalo. Upaya meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan menyediakan suatu sistem aplikasi pelayanan pajak Yanjak berbasis internet atau data online. Hal tersebut adalah salah satu upaya yang sangat efektif untuk saat ini. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat harus lebih dioptimalkan serta keterampilan sumber daya manusia atau pegawai Badan Keuangan dioptimalkan lebih baik lagi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa Efektivitas Pembayaran PBB Melalui Pelayanan Pajak (Yanjak) di Badan Keuangan, dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak Kota Gorontalo untuk membayar PBB secara tepat waktu.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan kuantitas, kualitas, waktu yang diperlukan untuk mencapainya dan seberapa jauh target telah dicapai.[4] Tidak hanya mencapai hasil, tetapi juga mencapainya dengan cara yang tepat adalah bagian dari efektivitas. Dengan kata lain, suatu tindakan atau kegiatan dianggap efektif jika mencapai hasil yang diinginkan dengan memaksimalkan anggaran, tenaga, sumber daya, dan waktu yang tersedia. Efektivitas terus berkembang seiring dengan perubahan dalam cara orang berpikir dan kebutuhan lingkungan sosial. Pengertian dan aplikasinya juga terus berkembang seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Teori Administrasi Pajak

Administrasi pajak dapat dianggap sebagai fungsi, sistem, lembaga, atau manajemen publik dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak pajak, baik itu dilakukan di dalam atau di luar kantor. Pencatatan (*recording*),

[4] Antimus Xaverius Ansfridho and Dody Setyawan, "Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* viii, no. 2 (2019): 55–63.

penggolongan (*classifying*), dan penyimpanan adalah semua kegiatan penatausahaan (*clerical works*).[5] Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, lembaga yang bersangkutan harus melakukan program administrasi pajak untuk meningkatkan sistem pajak, terutama dalam bidang administrasi. Tujuan dari program modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah untuk mengubah atau mengubah sistem administrasi pajak. Modernisasi ini berfokus pada penerapan pemerintahan yang baik, yang berarti menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan terbaru. Tujuan modernisasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kinerja dan integritas aparat pajak.

Efektivitas Sistem Pelayanan Pajak Yanjak Online

Inisiatif Gerakan Menuju Kota Cerdas menggunakan evaluasi masalah dan peluang yang ada di masing-masing daerah. Salah satunya dari 50 kota dan kabupaten Indonesia adalah Gorontalo. Inovasi baru akan memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Inovasi ini memudahkan warga Kota Gorontalo dalam melakukan pembayaran pajak dimana saja kapan saja tanpa harus mengantri di Kantor Badan Keuangan. Inovasi baru dalam layanan pajak daerah seperti Yanjak ini para wajib pajak hanya perlu menggunakan perangkat elektronik internet data online.

Semua jenis objek pajak khususnya pembayaran PBB dapat dibayarkan melalui Pelayanan Pajak (Yanjak), situs web berbasis sistem informasi teknologi dan aplikasi yang dapat diakses secara online. Yanjak juga menyediakan dan menampilkan seluruh transparansi realisasi penerimaan pajak, laporan atau pelaporan sistem informasi manajemen kegiatan, SPPT, sensus pajak, Gis berbasis geografi informasi data wajib pajak dalam satu aplikasi layanan pajak.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong, Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari serta memahami apa yang dialami subjek penelitian tentang masalah yang dibahas.[6] Data deskriptif yang dihasilkan dari proses penelitian deskriptif ini berasal dari informasi yang dikumpulkan dan perilaku yang diamati dari individu. Data ini dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sebaliknya, Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pendekatan yang dilakukan pada objek alami. Peneliti bertindak sebagai alat utama atau kunci dalam pendekatan ini, dan berbagai teknik pengumpulan data digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam dan kontekstual. Data deskriptif yang dihasilkan dari proses penelitian deskriptif ini berasal dari informasi yang dikumpulkan dan perilaku yang diamati dari individu.

[5] M.Si Abdul Rahman, SKM, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan* (Bandung, 2010).

[6] By Robert and E Bob Brown, "EFEKTIVITAS APLIKASI SEKEJAP DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH," no. 1 (2004): 1–14.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Data ini dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sebaliknya, Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pendekatan yang dilakukan pada objek alami. Peneliti bertindak sebagai alat utama atau kunci dalam pendekatan ini, dan berbagai teknik pengumpulan data digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam dan kontekstual.[7] Tiga pendekatan utama digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Lusiana & Kirwani pengamatan atas fenomena yang dilakukan, diselidiki serta diteliti secara sistematis dikenal dengan observasi.[8] Selanjutnya, Esterberg dan Sugiyono memiliki pendapat definisi wawancara sebagai pertemuan yang dilakukan antara dua orang atau bahkan lebih yang dilakukan melalui tanya jawab untuk bertukar ide dan informasi. Setelah itu, sebuah topik dapat dibangun dengan melakukan wawancara antara dua orang, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk bertukar informasi dan gagasan dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban.[9] Dokumentasi yakni teknik untuk menghasilkan dan mendapatkan data dan informasi dalam bentuk tulisan, buku, arsip, dokumen, angka, gambar, dan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Salah satu metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah dengan menggunakan catatan tertulis atau lisan, gambar, dan dokumen. Menghasilkan rumusan strategi pemasaran untuk mengmbangkan bisnis yang dijalani.[10] Peneliti melakukan analisis wawancara dengan cermat untuk melihat elemen penting dari interaksi. Menggabungkan data dari beberapa sumber, termasuk data primer langsung dari lapangan, data sekunder dari literatur terkait, dan data tersier dari berbagai sumber dapat menunjukkan kualitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi

Untuk sosialisasi terkait layanan pembayaran pajak online, juga dikenal sebagai "yanjak", Badan Keuangan masih belum menginformasikan secara menyeluruh tentang cara menggunakannya. Sebagian masyarakat menghadapi kesulitan atau masalah. Selain itu, masyarakat takut membayar pajak melalui orang lain yang bekerja di kantor kelurahan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo belum berhasil mempromosikan pembayaran pelayanan pajak online yang dikenal sebagai Yanjak. Ini ditunjukkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan pelayanan pajak online, juga dikenal sebagai Yanjak. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo tidak berkembang dengan optimal dan kemajuan kesejahteraan masyarakat lambat.

[7] Andi Yusuf Katili et al., "Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Pbjt) Di Kota Gorontalo," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7358–7369.
[8] Lia Lusiana and Kirwani, "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pengrajin Melalui Peningkatan Pendapatan Oleh Pengusaha Home Industri Sepatu Di Dusun Genengan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 (2016): 2.
[9] Ibid.
[10] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pegawai atau Sumber daya manusia masih belum optimal karena Badan Keuangan kurang tegas dalam menerapkan aturan produknya yang baru dibuat, yaitu yanjak (Pelayanan Pajak) online. Peraturan ini harus sejalan dengan pengembangan pelatihan tentang pemahaman proses administrasi pajak online. Untuk membantu masyarakat memahami yanjak, alangkah baiknya pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo lebih meningkatkan pelatihan tentang proses administrasi pajak online. Untuk memberikan administrasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat, pemerintah harus menjalankan tugasnya. Menjalin kerja sama yang efektif dengan seluruh kelurahan atau kecamatan Kota Gorontalo dapat meningkatkan hubungan masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan masalah. untuk menjadi lebih rajin lagi, melakukan evaluasi dan turun ke lapangan di masyarakat. Untuk menghindari keterlambatan administrasi dalam membayar pajak serta mempelajari realitas masyarakat.

Sistem

Karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki handphone yang cukup untuk mengakses internet dan hanya tahu cara membayar secara online tanpa internet, sistem dan teknologi di masyarakat belum cukup efektif. Akibat banyaknya orang yang mengakses aplikasi tersebut, sistem sering mengalami overload, yang dapat memperlambat masyarakat untuk membayar pajaknya tepat waktu karena sistem dan teknologi yang tidak memadai. Pembayaran PBB melalui pelayanan pajak online yang dikenal sebagai Yanjak di Badan Keuangan Kota Gorontalo tidak efektif. Hal ini terlihat pada belum optimalnya sistem pelayanan pajak (Yanjak) yang dibuat oleh pemerintah serta teknologi fasilitas yang disediakan., Yanjak. Sebaliknya, masyarakat belum terbiasa dengan pelayanan pajak online yang disebut Yanjak. Dengan demikian, hal ini berdampak pada keengganan masyarakat untuk membayar PBB melalui palayanan pajak atau Yanjak.

Pembahasan

Pendapatan asli Kota Gorontalo dapat turun karena ketidakpatuhan warga yang sering menunggak dan tidak membayar PBB. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran pelayanan pajak, juga dikenal sebagai yanjak, melalui internet. agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, dan agar masyarakat hidup dalam lingkungan yang adil dan sejahtera. Dengan mempertimbangkan peran besar yang dimainkan oleh Badan Keuangan, penerapan kebijakan pembayaran PBB melalui pelayanan pajak online yang dikenal sebagai Yanjak adalah salah satu pilihan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para wajib pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tepat waktu dan untuk mendorong kemajuan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah berusaha untuk mengetahui apakah layanan pajak online (Yanjak) yang ditawarkan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan yang diberlakukan untuk administrasi pelayanan pajak

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

secara online, yang dikenal sebagai Yanjak, menimbulkan banyak masalah yang berdampak negatif pada pendapatan asli daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo menghadapi sejumlah masalah, termasuk kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum, kualitas pelatihan yang buruk, dan ketersediaan fasilitas untuk sistem administrasi pelayanan pajak yang tidak memadaI.

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan tentang Efektivitas Pembayaran PBB Melalui Pelayanan Pajak (Yanjak) di Badan Keuangan Kota Gorotalo dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Upaya untuk mensosialisasikan Yanjak belum mencapai seluruh lapisan masyarakat, banyak warga yang tidak tahu atau tidak paham cara menggunakan layanan ini. Program edukasi dan kampanye informasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih familiar dengan proses dan manfaat pembayaran pajak online. Pegawai yang bekerja di bidang administrasi perpajakan tidak menerima pelatihan yang cukup. Ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan prosedur perpajakan terbaru. Kekurangan pengetahuan ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan menghambat kemampuan mereka untuk menangani masalah atau pertanyaan yang dihadapi wajib pajak. Keterampilan teknis yang kurang memadai memperlambat proses pelayanan dan membuat pengguna kesulitan mendapatkan dukungan teknis dari staf. Proses pembayaran pajak online sering terganggu oleh kesalahan dalam aplikasi Yanjak. Hal ini menyebabkan pengguna menjadi frustrasi dan menurunkan kepercayaan sistem. Jika pemeliharaan dan pembaruan sistem dilakukan dengan cara yang tidak ideal, masalah ini akan menjadi lebih buruk dan akan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan gangguan teknis. Orang-orang di beberapa daerah tidak dapat mengakses layanan online karena jaringan internet di sana belum memadai dan kualitasnya buruk. Kurangnya dukungan teknologi yang memadai menghalangi staf untuk menyediakan layanan yang cepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdul Rahman, SKM, M.Si. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung, 2010.

[2] Andi, Nur, and Guntur Muhammad. *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf.

[3] Ansfridho, Antimus Xaverius, and Dody Setyawan. "Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* viii, no. 2 (2019): 55–63.

[4] Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

[5] Indawati, Yana, Teddy Prima Anggriawan, and Pusaka Bintang Sakti. "Pengaruh

Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9796–9802.

[6] Katili, Andi Yusuf, Gafar Tomutu, Ivana Novarianti Gagulu, Rivani Datau, Ahmad Nurmasyah, Sumaga Sumaga, Siti Fadila Bete, and Bayu Bakhtiar Liputo. "Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Pbjt) Di Kota Gorontalo." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7358–7369.

[7] Lusiana, Lia, and Kirwani. "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pengrajin Melalui Peningkatan Pendapatan Oleh Pengusaha Home Industri Sepatu Di Dusun Genengan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 (2016): 2.

[8] Pérez Dávila, Juan. "Perda Gorontalo" 21, no. 1 (2020): 1–9.

[9] Robert, By, and E Bob Brown. "EFEKTIVITAS APLIKASI SEKEJAP DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH," no. 1 (2004): 1–14.

[10] WAHYUDI GOBEL et al. "Implementation of E-Government in Public Services Through the Online Tax System (E-Tax) in the City of Gorontalo." *Russian Law Journal* 11, no. 2s (2023): 305–312.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)